

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan masalah soial yang dihadapi oleh setiap negara terutama pada negara berkembang seperti Indonesia. Banyak dampak negatif yang disebabkan oleh kemiskinan selain timbulnya masalah sosial, kemiskinan sendiri juga dapat mempengaruhi pembangunan ekonomi suatu negara. Di Indonesia masalah kemiskinan cukup rumit dikarenakan luas wilayah, beragam sosial budaya masyarakat dan pengalaman kemiskinan yang berbeda disetiap wilayah. Kemiskinan adalah suatu standar tingkat hidup yang rendah. Besarnya ukuran standar hidup tersebut relatif menurut pendekatan mana yang digunakan. Salah satunya BPS Indonesia mendasarkan pada besarnya rupiah yang dikeluarkan untuk kebutuhan minum dan makanan menggunakan patokan 2.100 kalori per hari, jika di bawah itu maka tergolong dalam penduduk miskin.

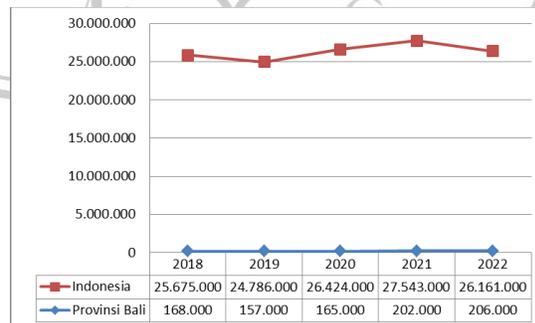
Istilah kemiskinan itu muncul karena seseorang atau sekelompok orang yang tidak sanggup untuk memenuhi kebutuhan ekonomi yang dianggap sebagai kebutuhan pokok. Kemiskinan juga sangat berkaitan dengan ketidak tersediaan lapangan kerja dimana keterbatasan lapangan kerja itu biasanya dikategorikan sebagai orang miskin yang tidak memiliki pekerjaan (pengangguran), serta tingkat kesehatan, pendidikan dan pendapatan tidak memadai dengan keterbatasan ekonomi. Persoalan kemiskinan ini yang telah menyebabkan jutaan anak-anak yang tidak dapat menempuh pendidikan yang berkualitas, kesulitan dalam membiayai kesehatan, semakin meningkatnya jumlah pengangguran yang disebabkan karena minimnya lapangan pekerjaan, kurangnya perhatian pemerintah khususnya pada masyarakat miskin dan kurangnya jaminan sosial sehingga menyebabkan jutaan masyarakat yang kekurangan dalam memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan (Dora, 2017).

Permasalahan kemiskinan di Indonesia terdapat salah satu daerah yang penduduk miskinnya masih cukup tinggi yaitu Provinsi Bali. Provinsi Bali

merupakan salah satu wilayah yang pertumbuhannya ekonominya pesat. Namun di tengah hal tersebut jumlah penduduk miskin masih sangat tinggi di beberapa Kabupaten/kota. Permasalahan kemiskinan masih menjadi pokok persoalan yang harus mendapatkan perhatian lebih. Dalam situasi saat ini, tingkat kemiskinan bukan hanya di pandang dari rendahnya kualitas ekonomi, tapi sudah di pandang dari sudut yang berbeda dan tergantung pandangan yang digunakan.

Provinsi Bali yang dikenal sebagai Pulau Dewata, merupakan salah satu destinasi pariwisata yang terkenal di dunia. Keindahan alamnya, mulai dari pantai berpasir putih, pegunungan, hingga terasering sawah, ditambah dengan kekayaan budaya yang unik dan tradisi yang masih terjaga. Setiap tahunnya Bali menarik jutaan wisatawan, baik domestik maupun mancanegara. Sektor pariwisata menjadi pilar utama ekonomi Bali, berkontribusi besar terhadap pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Namun, meskipun pariwisata berperan sebagai penggerak utama ekonomi Bali, masih terdapat tantangan sosial dan ekonomi yang harus dihadapi. Salah satu isu yang muncul adalah tingginya tingkat kemiskinan yang masih terdapat di beberapa daerah di Bali. Bali sangat bergantung pada sektor pariwisata, sehingga perubahan dalam jumlah kunjungan wisatawan langsung memengaruhi ekonomi lokal, tingkat pengangguran, dan kemiskinan. Karena pariwisata merupakan pilar utama ekonomi Bali, dampaknya terhadap berbagai aspek sosial-ekonomi seperti pengangguran, kesehatan, pendidikan, dan pendapatan per kapita sangat besar.



Sumber : BPS Provinsi Bali

Gambar 1.1 Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia dan Bali Tahun 2018-2022 (ribu jiwa)

Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia pada tahun 2018 hingga tahun 2022 mengalami beberapa kali fase naik turun. Pada tahun 2018 sampai 2019 jumlah penduduk miskin turun dari sebesar 25.675 ribu jiwa pada tahun 2018 menjadi 24.786 ribu jiwa pada tahun 2019. Namun di tahun 2020 kenaikan jumlah penduduk miskin relatif tinggi menjadi 26.424 ribu jiwa dan pada tahun 2021 sebesar 27.543, yang dimana pada tahun tersebut di seluruh dunia termasuk Indonesia mengalami pandemi covid-19 yang menyebabkan banyak kegiatan ekonomi terhenti atau berjalan sangat lambat. Banyak perusahaan yang mengalami penurunan pendapatan yang cukup drastis dan terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal dan dengan banyaknya perusahaan yang tutup atau mengurangi tenaga kerjanya, tingkat pengangguran meningkat tajam, yang secara langsung berdampak pada peningkatan kemiskinan. Akibatnya penduduk yang tergolong tidak miskin namun penghasilannya berada disekitar garis kemiskinan banyak yang bergeser posisinya menjadi miskin.

Usaha pemerintah dalam penanggulangan masalah kemiskinan sangatlah serius, bahkan merupakan salah satu program prioritas, termasuk bagi pemerintah Provinsi Bali. Upaya penanggulangan kemiskinan di Bali dilakukan melalui beberapa strategi yang melibatkan berbagai pihak dan sektor:

- a. Program Sosial dan Ekonomi: Program-program yang dirancang untuk meningkatkan kesehatan, pendidikan, dan pendapatan per kapita juga menjadi bagian dari upaya mengurangi angka kemiskinan di Bali. Program-program ini diharapkan dapat memberikan dampak positif yang berkelanjutan pada masyarakat.
- b. Fokus pada Sektor Pertanian dan Pariwisata: Pemulihan sektor pariwisata yang merupakan tulang punggung ekonomi Bali serta pemberdayaan sektor pertanian menjadi bagian dari strategi untuk mengurangi kemiskinan. Dengan pemulihan sektor-sektor ini, diharapkan akan ada peningkatan kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat.
- c. Pemberdayaan Desa Adat: Desa adat di Bali juga dilibatkan dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Keterlibatan ini mencakup berbagai program

pemberdayaan masyarakat lokal untuk meningkatkan pendapatan dan kualitas hidup.

Hasil dari upaya penanggulangan kemiskinan di Provinsi Bali memperlihatkan pengaruh yang positif. Hal ini terlihat dari jumlah penduduk miskin yang mengalami kenaikan. Pada gambar 1.1 menunjukkan kecenderungan mengalami beberapa kali fase naik turun. Pada tahun 2018 jumlah penduduk miskin sebesar 168 ribu jiwa dan turun menjadi 157 ribu jiwa pada tahun 2019, tetapi pada tahun 2020 sampai tahun 2022 mengalami kenaikan yang cukup tinggi.

Pandemi COVID-19 memiliki dampak besar terhadap ekonomi Bali, terutama karena ketergantungan provinsi ini pada sektor pariwisata. Pembatasan perjalanan dan penutupan tempat wisata menyebabkan penurunan tajam dalam jumlah wisatawan, yang secara langsung berdampak pada pendapatan masyarakat yang bergantung pada industri ini. Hal ini menyebabkan banyak kehilangan pekerjaan dan penurunan pendapatan, yang meningkatkan angka kemiskinan. Selama pandemi, banyak usaha kecil dan menengah (UKM) menghadapi kesulitan untuk bertahan akibat penurunan permintaan dan gangguan dalam rantai pasokan. Hal ini mengakibatkan banyak bisnis tutup dan berkurangnya lapangan pekerjaan, yang pada akhirnya meningkatkan angka kemiskinan. Inflasi dan kenaikan harga bahan pokok juga memberikan tekanan tambahan pada rumah tangga berpenghasilan rendah. Ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar akibat kenaikan harga ini menyebabkan peningkatan angka kemiskinan.

Tabel 1 Jumlah Penduduk Miskin Menurut Provinsi Tahun 2018-2022 (ribu jiwa)

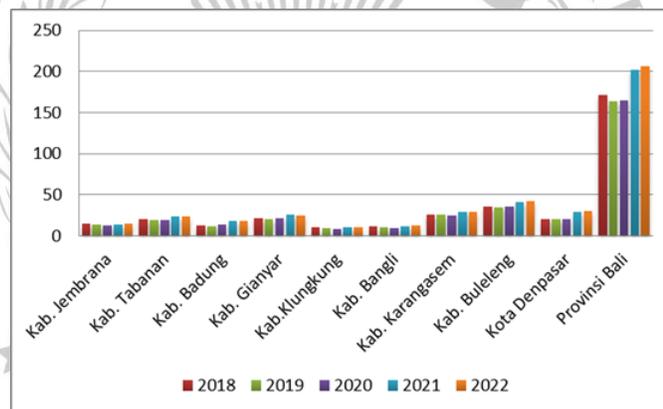
Provinsi	Jumlah Penduduk Miskin menurut Provinsi (Ribu Jiwa)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Aceh	832	810	815	834	807
Sumatera Utara	1292	1261	1283	1344	1268
Sumatera Barat	353	343	344	371	335
Riau	494	484	483	501	485
Jambi	281	273	278	294	279
Sumatera Selatan	1076	1067	1082	1114	1045
Bengkulu	304	298	303	306	297
Lampung	1092	1041	1049	1084	1002
Kep. Bangka Belitung	70	67	68	73	67
Kepulauan Riau	125	128	132	144	152
DKI Jakarta	372	362	481	502	502
Jawa Barat	3539	3376	3920	4195	4071
Jawa Tengah	3867	3679	3981	4110	3831
DI Yogyakarta	450	441	476	506	455
Jawa Timur	4292	4056	4419	4573	4181
Banten	669	641	776	867	814
Bali	168	157	165	202	206
Nusa Tenggara Barat	736	706	714	747	732
Nusa Tenggara Timur	1134	1129	1154	1169	1132
Kalimantan Barat	370	370	367	368	350
Kalimantan Tengah	136	131	133	140	145
Kalimantan Selatan	195	190	188	208	196
Kalimantan Timur	222	221	230	242	236
Kalimantan Utara	50	49	52	53	49
Sulawesi Utara	189	189	192	196	185
Sulawesi Tengah	413	404	399	404	388
Sulawesi Selatan	780	760	777	785	777
Sulawesi Tenggara	302	300	302	319	310
Gorontalo	188	185	185	186	185
Sulawesi Barat	153	152	152	157	166
Maluku	318	320	318	322	291
Maluku Utara	82	87	86	87	80
Papua Barat	214	208	209	219	219
Papua	915	901	911	920	922
Indonesia	25675	24786	26424	27543	26161

Sumber : BPS Provinsi Bali

Keberhasilan Provinsi Bali dalam menanggulangi kemiskinan belum sepenuhnya berhasil. Ini terlihat dari jumlah penduduk miskin yang relatif tinggi. Pada Pulau Sumatera memiliki jumlah penduduk miskin yang cukup tinggi mengingat banyaknya provinsi besar dengan populasi yang padat. Pulau Jawa, dengan populasi yang paling padat di Indonesia, memiliki jumlah penduduk miskin yang signifikan, meskipun pemerintah berfokus pada pembangunan infrastruktur dan ekonomi di pulau ini. Pulau Kalimantan, dengan kekayaan sumber daya alamnya, memiliki variasi dalam jumlah penduduk miskin antar provinsi. Namun, jumlahnya cenderung lebih rendah dibandingkan dengan Sumatera dan Jawa. Pulau Sulawesi menunjukkan variasi yang signifikan,

dengan beberapa provinsi memiliki jumlah penduduk miskin yang tinggi sementara yang lain lebih rendah. Pulau Papua memiliki jumlah penduduk miskin yang tinggi karena faktor keterpencilan, infrastruktur yang kurang, dan tantangan ekonomi lainnya. Sementara Bali dan Nusa Tenggara, Bali sebagai destinasi wisata internasional, memiliki jumlah penduduk miskin yang relatif rendah dibandingkan dengan provinsi di pulau lainnya. Namun, provinsi di Nusa Tenggara seperti Nusa Tenggara Timur memiliki jumlah penduduk miskin yang lebih tinggi.

Dapat dilihat bahwa jumlah penduduk miskin di Bali lebih rendah dibandingkan dengan banyak provinsi lain di Indonesia, terutama yang ada di pulau-pulau besar seperti Sumatera dan Jawa. Ini dapat dikaitkan dengan sektor pariwisata yang berkembang pesat di Bali, yang menyediakan banyak peluang kerja dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat setempat.



Sumber : BPS Provinsi Bali

Gambar 1.2 Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2018-2022 (ribu jiwa)

Berdasarkan pada gambar 1, kabupaten/kota dengan jumlah penduduk miskin tertinggi di Provinsi Bali terdapat di Kabupaten Buleleng pada tahun 2022 yang mengalami kenaikan yang sangat tinggi sebesar 41,68 ribu jiwa dan Kabupaten Karangasem pada tahun 2022 sebesar 29,45 ribu jiwa. Jumlah tingkat kemiskinan dari tahun 2018 sampai 2022 mengalami fluktuasi, yang dimana hal tersebut mengalami dampak yang buruk terhadap perekonomian. Perekonomian yang baik apabila tingkat kemiskinan mengalami penurunan dari tahun ke tahun.

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menekan angka kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat. Untuk mengatasi masalah kemiskinan, pemerintah perlu mengetahui dan memahami faktor apa saja yang berpengaruh terhadap kemiskinan, agar langkah dalam mengambil kebijakan tepat sehingga mampu untuk menyelesaikan masalah tersebut.

(Widiarsana, 2022) dalam penelitiannya tentang pengaruh pendapatan perkapita dan pendidikan terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Bali menemukan bahwa pendapatan perkapita dan pendidikan secara simultan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Secara parsial pendapatan perkapita dan pendidikan berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan.

(Sinaga et al., 2023) dalam penelitiannya tentang pengaruh pendidikan, pendapatan perkapita dan pengangguran terhadap kemiskinan di Kepulauan Nias menemukan bahwa pendidikan berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kemiskinan. Selanjutnya, pendapatan perkapita berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan. Sedangkan pengangguran berpengaruh positif signifikan terhadap kemiskinan.

(Made Ariasih & Yuliarmi, 2021) dalam penelitiannya tentang pengaruh tingkat pendidikan, tingkat kesehatan dan pengangguran terbuka terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Bali menemukan bahwa secara simultan dan parsial tingkat pendidikan dan pengangguran terbuka berpengaruh terhadap kemiskinan. Sedangkan tingkat kesehatan secara parsial berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah penduduk miskin di kabupaten/kota Provinsi Bali, dalam judul skripsi “ **Pengaruh Pengangguran, Kesehatan, Pendidikan dan Pendapatan Perkapita terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Bali tahun 2018-2022**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah Bagaimana pengaruh Pengangguran, Kesehatan, Pendidikan Sekolah Dasar, Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Pendidikan Perguruan Tinggi dan Pendapatan Perkapita terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Bali tahun 2018-2022?

C. Batasan Penelitian

Kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks, yang tidak dapat dipandang dari satu sisi saja. Penelitian ini berfokus pada analisis variabel tingkat kemiskinan, pengangguran, umur harapan hidup saat lahir, persentase penduduk usia 15 tahun ke atas menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan pendapatan perkapita (PDRB Perkapita). Tahun yang digunakan dalam penelitian ini adalah tahun 2018 hingga tahun 2022. Kabupaten/kota pada penelitian ini terdiri dari 9 kabupaten/kota di Provinsi Bali yang meliputi Kabupaten Jembrana, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Bangli, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Buleleng dan Kota Denpasar. Data Jumlah Pengangguran, Kesehatan, Pendidikan dan Pendapatan Perkapita yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari Badan Pusat Statistik Provinsi Bali.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Pengangguran, Kesehatan, Pendidikan Sekolah Dasar, Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Pendidikan Perguruan Tinggi dan Pendapatan Perkapita terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Bali tahun 2018-2022

E. Manfaat Penelitian

Pada penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat secara teoritis maupun manfaat praktis sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

- a. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat dalam memperluas pengetahuan dan memperluas wawasan dalam dalam ilmu pengetahuan ekonomi khususnya tentang ekonomi pembangunan.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan kajian bagi penelitian selanjutnya.
2. Manfaat praktis
- a. Bagi peneliti
Penelitian ini merupakan kesempatan yang baik untuk menerapkan teori dengan peristiwa nyata yang terjadi di lapangan.
 - b. Bagi pemerintah
Penelitian ini bisa dijadikan sebagai rujukan yang nantinya bisa membantu dalam proses pembangunan daerah.

